PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEDUDUKAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh

Srihasmola Lahinta

NIM : 271 414 158

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Di Uji

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nur M. Kasim., S.Ag, MH	**Dolot Alhasni Bakung., SH. MH**
NIP: 19760208 200312 2 002	**NIP :19850827 200912 1 005**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

SuwitnoYutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

KEDUDUKAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

OLEH

SRIHASMOLA LAHINTA

NIM : 271 414 158

Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Hari/ Tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
Pukul : 11.15 WITA

Komisi Penguji :

1. **WENY A. DUNGGA, SH., MH** (.....)
   NIP: 19680522 200112 1 001
2. **JULIUS T. MANDJO S.H., M.H.** (.....)
3. **Dr. NUR M. KASIM., S.Ag, MH** (.....)
   NIP: 19760208 200312 2 002
4. **DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH, MH** (.....)
   NIP: 19850827 200912 1 005

GORONTALO, 25 MEI 2018
MENGETAHUI,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

MOH. RUSDIYANTO U. PULUHULAWA SH, M.HUM
NIP : 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

SRIHASMOLA LAHINTA, NIM : 271 414 158, KEDUDUKAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM, PEMBIMBING I *Dr. NUR M. KASIM., S.Ag, MH*, PEMBIMBING II DOLOT ALHASNI BAKUNG., SH. MH., FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di KUA Kota Utara dan ntuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran KUA dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative di dukung data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Di KUA Kota Utara yakni perkawinan wanita hamil tersebut adalah sah apabila yang menikahi wanita tersebut merupakan laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam itu sendiri bahwa anak sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada Bapaknya. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dimana ada yang berpendapat bahwa sebaiknya anak tersebut dilahirkan terlebih dahulu dan setelah itu baru dilakukan pernikahan Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut harus dilangsungkan sebelum anak tersebut lahir, sehingga status anak yang dilahirkan merupakan anak sah. Namun, tetap saja yang menjadi rujukan adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum agama Islam. Sedangkan peran KUA Kota Utara dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tetapi dengan ketentuan bahwa wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Jika tidak, maka pihak KUA akan menolak pernikahan tersebut dikarenakan berpedoman pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal). Disamping itu, minimnya anggaran yang ada membuat pihak KUA Kota Utara tidak dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga perkawinan wanita hamil tersebut belum dapat diminimalisir khususnya wilayah KUA Kota Utara.

Kata Kunci : Perkawinan Wanita Hamil, Anak Sah

ABSTRACT

SRIHASMOLA LAHINTA, STUDENT ID: 271 414 158, MARRIAGE STATUS OF PREGNANT WOMEN AND THE CHILD'S LEGITIMACY BASED ON COMPILATION OF ISLAMIC LAW, PRINCIPAL SUPERVISOR: Dr NUR M. KASIM., S.Ag., MH. CO-SUPERVISOR: DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH. MH., FACULTY OF LAW, UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

The objectives of this research are twofold. Firstly, it is intended to examine the implementation of law concerning the marriage status of pregnant women and the child's legitimacy from the perspective of Compilation of Islamic Law. Secondly, this research is aimed at exploring the roles of Religious Affairs Office (henceforth called *KUA*) in addressing the issue of marriage of pregnant women and determining the legitimate status of the women's child from the perspective of Islamic law.

This research employed normative law method; the data were collected from field observation. The results reveal that, according to the Islamic law, the status of the marriage of pregnant women in the research area is valid if she is married to the men who made her pregnant. This also confirms the legitimate status of the child of the pregnant women. According to the Compilation of Islamic Law, a child is considered legitimate to his or her parents if he or she was born to parents who are legally married, meaning that the child is allowed to be attributed to his father. Some of the scholars believe that the wedding ceremony should be carried out after the child is born while others have different view regarding this matter, leaving the issue a debatable topic among the scholars. Nevertheless, people refer to the Compilation of Islamic Law and Act Number 1 of 1974 Considering Marriage. It is revealed that the Religious Affairs Office only mediate the marriage of pregnant women if the men who made the women pregnant marry her. Otherwise, the marriage is considered illegitimate. Financial issues also obstruct the efforts of the Religious Affairs Office in the research area to held seminars regarding the marriage of pregnant women.

Keywords: Pregnant Women Marriage, Legitimate Status of Child

TRANSBAHASA
SK
MENTERI HUKUM & HAM RI
NO. AHU-0009641.AH.01.07.2017
IDEAS IN TRANSLATION